



KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

MEMBANGUN TRACE BARU HUBUNGAN INDONESIA-MALAYSIA

***Hadirin yang Saya Hormati,
Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,
Salam Sejahtera Untuk Kita Semua,***

Sejak kerajaan Malaysia berdiri tanggal 21 Agustus 1957, hubungan RI-Malaysia selalu mengalami pasang surut. Konfrontasi di zaman Soekarno dengan jargon "Ganyang Malaysia" pernah terjadi, namun hubungan harmonis di era Soeharto juga terus berlangsung, meskipun sesekali sempat terjadi "perang" antarwarga kedua negara di dunia maya. Semuanya ini tidak terlepas dari sikap Malaysia yang "tiba-tiba" melakukan berbagai aksi tidak menyenangkan, terhadap pemerintah dan rakyat Indonesia yang sedang berada dalam masa transisi demokrasi.

Dibanding hubungan dengan negara tetangga yang lain, hubungan Indonesia dengan Malaysia tergolong paling rawan konflik. Pasang surut hubungan kedua negara juga dapat ditelusuri dari masalah TKI dan TKW yang diperlakukan secara tidak manusiawi, klaim atas

produk kebudayaan Indonesia seperti batik, reog, tempe, lagu Rasa Sayange, angklung, hingga yang paling akhir masalah penangkapan dan penahanan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan RI yang sedang berpatroli oleh Polisi Marin Diraja Malaysia. Sikap Malaysia tersebut mengundang protes sejumlah elemen masyarakat di Indonesia, mulai aksi membakar bendera Malaysia, melempari Kantor Kedubes Malaysia di Jakarta, tuntutan untuk menarik Duta Besar RI di Kuala Lumpur, hingga nota protes diplomatik Kementeriann Luar Negeri RI ke pemerintah Malaysia.

Dalam menyikapi klaim-klaim Malaysia terhadap kekayaan budaya Indonesia, diperlukan kearifan yang luar biasa untuk menyelesaikannya, agar hubungan kedua negara secara keseluruhan tidak terganggu. Agar penyikapan terhadap hal-hal tersebut menjadi produktif, maka klaim-klaim Malaysia tersebut harus diletakkan sebagai kritik terhadap bangsa Indonesia dalam memperlakukan kekayaannya.

Bila dilihat dari sejarahnya, Indonesia dan Malaysia pada awalnya adalah bangsa serumpun yang terbelah ketika Belanda dan Inggris sebagai penjajah mengadakan pembagian kekuasaan melalui **traktat London (London treaty)** pada tahun 1824. Akibat lebih jauh dari traktat London tersebut adalah munculnya pemahaman bahwa Malaysia sebagai satu-satunya bangsa Melayu, pada hal jika merunut sejarah tidak demikian. Malaysia tidak identik dengan Melayu, dan Melayu tidak hanya di Malaysia. Warga Negara Malaysia tidak hanya ras Melayu, tetapi juga ada ras Cina, India, dan ras-ras lainnya. Demikian juga ras Melayu, tidak

hanya ada di Malaysia, tetapi juga ada di Indonesia, Brunei, Filipina, Thailand, hingga Madagaskar di Afrika Selatan.

Hadirin yang Terhormat,

Ketegangan antara Indonesia dan Malaysia merupakan ekspresi dari pencarian identitas negara pasca kolonial. Indonesia yang lahir dari penjajahan Belanda dan Malaysia yang lahir dari penjajahan Inggris membutuhkan identitas nasional untuk menyatukan semua warga negaranya. Dengan kata lain, klaim Malaysia terhadap kekayaan Indonesia merupakan upaya mereka untuk menemukan, membangun, dan menguatkan identitas nasionalnya.

Namun, semuanya itu adalah bagian dari masa lalu. Ke depan, baik Indonesia maupun Malaysia **harus mampu membangun hubungan bilateral** yang lebih harmonis, damai dan bermartabat. Hal ini perlu dilakukan, mengingat berbagai tantangan eksternal yang dihadapi oleh kedua negara semakin berat. Tantangan-tantangan tersebut antara lain; globalisasi dengan segala konsekuensinya, interdependensi antar-bangsa dan inter-koneksi antar-masalah global, munculnya China dan India sebagai kekuatan-kekuatan baru yang menyebabkan persaingan semakin tajam khususnya di bidang ekonomi, serta munculnya ancaman keamanan yang bersifat transnasional.

Semua faktor itu, ditambah dengan perlunya kedua negara untuk menyesuaikan diri agar lebih tanggap dalam menghadapi ancaman maupun kesempatan baru, makin memberi keyakinan bahwa hubungan

kerja sama kedua negara selama ini **sudah tidak memadai lagi**. Kebutuhan untuk mencapai hubungan yang makin harmonis, damai, dan bermartabat, **tidak cukup** hanya menekankan pada hubungan antar-pemerintah atau hanya melibatkan para elit politiknya saja, tetapi harus **melibatkan masyarakat luas** dalam berbagai kegiatan.

Hubungan *people-to people* diantara kedua negara sejauh ini **belum cukup dewasa**. Tanpa pemahaman dan respons yang simpatik dari rakyat negara kedua negara, maka hubungan baik dan saling pengertian diantara para pemimpin dan elit politiknya menjadi tidak ada artinya.

Dengan demikian, membangun **trace** baru hubungan Indonesia-Malaysia yang berbasiskan pada hubungan *people to people* tentunya memerlukan waktu. Namun, upaya kearah itu harus dilakukan, agar rasa hormat terhadap kedaulatan dan identitas nasional masing-masing negara tidak hanya ada di benak para pemimpin atau elit politiknya, tetapi juga sampai di tingkat akar rumput.

Dengan identitas baru yang menekankan pada **hubungan antar-warga (*people to people*)**, kedua negara harus mampu merespon dan mengelola setiap keinginan masyarakatnya untuk terlibat secara aktif dalam upaya meningkatkan kerjasama kedua negara. Keuntungan dari kerjasama yang bersifat *people to people* ini adalah kontinuitasnya. Apabila terjadi pergantian pemerintahan di masing-masing negara, maka kerjasama semacam ini **tidak akan terganggu**.

Di samping itu, pendekatan *people to people* ini juga bisa menjembatani **alih generasi** di masing-masing negara. Dengan

gambaran seperti itu, kedua negara harus dapat mendorong masyarakatnya, untuk lebih aktif berdialog atau melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian hubungan yang harmonis, damai, dan bermartabat.

Hadirin yang Terhormat,

Peluncuran buku yang bertajuk "**Membangkitkan Memori Kolektif Kesejarahan Indonesia-Malaysia**" di dalam sebuah seminar yang bertema "**Membangun Trace Baru Hubungan Indonesia-Malaysia**", diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran yang signifikan baik bagi Pemerintah dan DPR-RI dalam upaya meningkatkan hubungan kedua negara yang lebih bersahabat di masa mendatang.

***Wallahul Muwaffiq Illa Aqwamith Thariq
Wassalamu'alaikum Warahmatullahiwabarakatuh***

Jakarta, 17 Februari 2011

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Dr. H. Marzuki Alie